

## **Menyambut Era SBY Kedua, Yang (Mudah-mudahan) Lebih Bersih dari Era SBY Pertama**

*George Junus Aditjondro*

### **Abstrak**

Dilantiknya Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2009-2014 membuat kalangan dunia usaha lega, tapi meninggalkan pekerjaan rumah yang tidak mudah dalam rangka menyusun Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (KIB II). Sebab, kabinet mendatang harus mengkompromikan keinginan dunia bisnis untuk iklim usaha yang stabil, dengan ambisi elit partai-partai politik di luar Partai Demokrat, untuk ikut menikmati kekuasaan, dengan dalih ikut menciptakan kemaslahatan umum. Selain itu, bentuk kabinet baru yang dirancang juga harus cocok untuk menjalankan rencana kerja selama lima tahun mendatang. Itu tentu saja, dengan mempertimbangkan minimalisasi oposisi dalam parlemen.

Pemerintah, parlemen, dan lembaga yudikatif mendatang perlu mengembalikan kepercayaan rakyat, dengan menjalankan transparansi kekayaan para pemangku jabatan umum, serta jaringan bisnis dari kerabat dan sahabat para pejabat. Hal ini semakin urgen, dengan adanya kemungkinan bahwa PDI Perjuangan tidak akan melakukan oposisi terhadap rencana kenaikan harga BBM, yang rencananya akan dilakukan oleh pemerintah mendatang, demi menutupi deficit APBN.

Dugaan bahwa PDI Perjuangan tidak akan menentang rencana kenaikan harga BBM itu didasarkan pada kenyataan bahwa partai itu masih dikuasai oleh hegemoni keluarga besar Megawati Soekarnoputri dan Taufik Kiemas (TK), yang menguasai selusin SPBU di Jabodetabek, yang merupakan basis diversifikasi usaha keluarga besar itu bersama besannya, Bambang Sukmono Hadi (BSH), mertua politikus muda dan puteri pasangan itu, Puan Maharani. Transparansi kekayaan keluarga besar TK dan besannya, sepatutnya menyertai penetapan TK sebagai Ketua MPR RI yang baru.

### **KIB II dan Dukungan Dua Fraksi**

Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode kedua (2009-2014), didampingi Wakil Presiden Boediono, pada 20 Oktober 2009. Dunia usaha boleh bernafas lega, sebab begitulah harapan 61 dari 100 orang pemimpin perusahaan papan atas di Jakarta dan sekitarnya yang diwawancarai *Warta Ekonomi*, April lalu (*Warta Ekonomi*, 4-17 Mei 2009:51).

Sehari sesudahnya, nama-nama para menteri dan pejabat setingkat menteri di kabinetnya pun resmi diumumkan. Risiko berkoalisi dengan begitu banyak partai lain cukup mempersulit penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (KIB II) yang betul-betul kabinet teknokrat “yang terdiri dari tenaga-tenaga yang kompeten, bersih, jujur, dan penuh dedikasi”, seperti janji SBY dalam pidato penerimaannya sebagai Presiden Terpilih 2009-2014, di Pekan Raya Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2009. Apalagi setelah muncul dukungan faksi Aburizal (“Ical”) Bakrie di Golkar dan faksi Taufik Kiemas (TK) di PDI-P ke kubu SBY (*Intelijen*, 26 Agustus-8Sept.2009:41), beberapa petinggi kedua partai besar itu dapat diangkat

menjadi Menteri KIB II. Dari faksi Ical, seperti diketahui, ada Agung Laksono (Menko Kesra), Fadel Muhammad (Menteri Kelautan dan Perikanan), MS Hidayat (Menteri Perindustrian), dan Mustafa Abubakar (Meneg BUMN). Sedangkan dari faksi TK, meski sebelumnya santer disebut-sebut nama Pramono Anung dan Tjahjo Kumolo, akhirnya tidak ada yang masuk karena Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ragu-ragu menunjukkan persetujuannya. Terlepas dari itu, TK, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPP PDI Perjuangan, akhirnya terpilih menjadi ketua MPR-RI (*Detik News*, 12 Ag. 2009).

Mengambil hati kedua pasangan kompetitornya dalam Pilpres 8 Juli 2009 itu memang semakin penting, setelah SBY dalam pidatonya beberapa jam setelah ledakan bom di kedua hotel di Mega Kuningan, Jumat 17 Juli lalu, secara implisit menuduh kedua pasangan Capres dan Cawapres saingannya terlibat. Tawar-menawat jabatan menteri perlu dilakukan untuk menjamin agar blok pemerintah tidak terlalu rentan posisinya di DPR RI. Apabila Partai Golkar dan PDI-P tidak dapat dirayu untuk mendukung rezim SBY-Boediono, kelebihan suara blok pemerintah *vis-à-vis* blok oposisi masih cukup kuat, yakni 341 *versus* 246 kursi. Namun kalau PKS dengan 57 kursinya di tengah jalan berbalik mendukung blok oposisi, posisi blok pemerintah akan sangat rentan (*Intelijen*, 29 Juli-11 Ag. 2009: 25).

Sementara itu duet SBY Boediono pasti akan memperhatikan aspirasi dunia usaha demi kestabilan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau begitu, sesuai dengan survei Kabinet Perekonomian Pilihan Pengusaha yang dilakukan majalah *Warta Ekonomi*, Juli lalu, sebagian besar wajah lama yang dijagokan 120 orang eksekutif puncak konglomerat, BUMN, dan perusahaan swasta domestik di wilayah Jakarta, perlu tetap dipertahankan. Para eksekutif bisnis menjagokan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menko Perekonomian atau Menteri Keuangan (akhirnya menjadi Menteri Keuangan), Rahmat Gobel sebagai Menteri Perindustrian (tidak terpilih), Purnomo Yusgiantoro sebagai Menteri ESDM (akhirnya menjadi Menteri Pertahanan), Marie Elka Pangestu sebagai Menteri Perdagangan, Sofyan Djalil sebagai Meneg BUMN (tidak terpilih), Anton Apriyantoro sebagai Menteri Pertanian (tidak terpilih), M.S. Kaban sebagai Menteri Kehutanan (tidak terpilih), Djoko Kirmanto sebagai Menteri Pekerjaan Umum (tidak terpilih), M. Nuh sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi (akhirnya menjadi Menteri Pendidikan Nasional), Erman Soeparno sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (tidak terpilih), Djusman Syafii Djamal sebagai Menteri Perhubungan (tidak terpilih), dan Suryadharma Ali sebagai Meneg Koperasi dan UKM (akhirnya menjadi Menteri Agama) (*Warta Ekonomi*, 27 Juli-9 Ag. 2009: 27-28).<sup>1</sup>

Melihat hasil survey majalah bisnis itu, tampaklah bahwa dunia usaha pada umumnya menginginkan menteri-menteri KIB I di bidang ekonomi melanjutkan peranan mereka. Kecuali Fahmi Idris, yang terancam kedudukannya sebagai menteri perindustrian oleh Rahmat Gobel, yang kelompoknya, Panasonic Gobel, yang berpenghasilan 1,21 milyar dolar AS. Namun apabila Gobel merapat ke SBY, posisi Fahmi Idris bisa aman, sementara Rahmat Gobel menjadi menteri Perdagangan, apabila Marie Elka Pangestu tergeser dari posisinya (*Warta Ekonomi*, 27 Juli-9 Ag. 2009; *Investor*, Ag.

---

<sup>1</sup> Dalam edisi Agustus lalu, majalah *investor* juga mengutak-atik kursi Menteri dalam KIB II. Majalah ini melaporkan, SBY telah memberikan mandat kepada wakil presidennya, untuk mengusulkan nama-nama Menteri bidang Ekonomi. Demi melanjutkan kerjasama Boediono dengan Sri Mulyani Indrawati, jabatan Menteri Keuangan akan tetap dipegang oleh mantan Direktur IMF wilayah Asia Pasifik ini. Raden Pardede dijagokan untuk menjadi Menko Perekonomian, Chatib Basri di BAPPENAS, Rahmat Gobel Menteri Perindustrian, dan Hatta Rajasa Menteri ESDM (*Investor*, Ag. 2009: 38-39).

2009: 39; *Globe Asia*, Agt. 2009: 104). Tapi, seperti diketahui, Fahmi Idris dan Rahmat Gobel akhirnya tidak terpilih untuk duduk di posisi apa pun.

Beberapa nama lain yang sebelumnya dijagokan kalangan bisnis menjadi menteri dalam KIB II, apabila tokoh-tokoh lama berhalangan, adalah Hilmi Panigoro, yang kelompok Medconya berpenghasilan 1,3 milyar dolar AS, dijagokan sebagai Menteri ESDM; Agus Martowardjojo, yang telah sukses membangun Bank Mandiri, dijagokan sebagai Meneg BUMN; serta Sandiaga S. Uno, *managing director* kelompok investasi Saratoga, yang berpenghasilan 1,98 milyar dolar AS, dan mantan Ketua HIPMI, dijagokan sebagai Meneg Koperasi dan UKM, sesuai dengan posisinya di KADIN (*Warta Ekonomi*, 27 Juli-9 Agt. 2009: 29; *Investor*, Agt. 2009: 39; *Globe Asia*, Agt. 2009: 98, 101).

Sinergi di antara anggota-anggota Tim Ekonomi KIB II ini nantinya akan banyak ditentukan oleh orang yang akan menjabat sebagai Menko Perekonomian. Apabila Sri Mulyani Indrawati kembali ke posisi Menteri Keuangan, orang kedua yang masuk bursa kabinet adalah Raden Pardede, mantan konsultan Bank Dunia (1994-1995) dan Bank Pembangunan Asia (2000-2001), mantan Ketua Tim Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia sekaligus staf khusus Menko Perekonomian (2004-2005), sera komisaris Bank Central Asia (*Warta Ekonomi*, 27 Juli-9 Agt. 2009: 34-35). Melihat janji SBY dalam pidato penerimaannya untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur, kans Raden Pardede untuk menjadi Menko Perekonomian cukup besar. Tapi, seperti diketahui, dia tidak terpilih untuk duduk di posisi apa pun.

Kuntoro Mangkusubroto sendiri besar kemungkinan akan menjabat sebagai Menko Perekonomian, sehingga Sri Mulyani dapat kembali mengfokuskan perhatiannya ke bidang keuangan, sebagai Menteri Keuangan. Padahal, dunia bisnis ikut mencalonkan Kuntoro untuk menjadi Menteri ESDM, di samping Purnomo Yusgiantoro, Hilmi Panigoro, dan Hatta Rajasa (*Warta Ekonomi*, 27 Juli-9 Agt. 2009: 27). Tapi, seperti diketahui dia diangkat menjadi Ketua UKP3R (Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan).

Berbeda dengan di masa lalu, *think tank* penyiapan KIB II tidak langsung mulai dengan mencari orang-orang yang cocok, tapi mulai dengan menyusun rencana kerja kabinet mendatang, khususnya rencana kerja 100 hari pertama. Sesudah itu baru disusun bentuk organisasi kabinet mendatang, yang kelompok Menkunya bisa jadi akan berbeda dari pada kabinet sekarang. Langkah terakhir, baru dicari orang-orang yang tepat untuk menduduki posisi dalam organisasi itu. Maka, pada saat-saat menentukan itu, Kuntoro bersama seluruh anggota *think tank*-nya dikonsinyir di suatu tempat, tanpa dapat dihubungi pihak luar melalui sms, telepon, maupun *email*.

### **Menambal Defisit APBN**

Salah satu rencana kerja yang akan paling mempengaruhi akseptasi masyarakat bagi rezim SBY-Boediono adalah usaha menambal defisit APBN dengan menghapus subsidi BBM. Makanya, menteri-menteri yang harus paling tebal telinganya, yang mulai berfungsi sesudah KIB I berakhir masa jabatannya, 20 Oktober lalu, adalah mereka yang bakal berurusan dengan kenaikan harga BBM. Namun, belum sampai berakhir masa jabatannya, Meneg BUMN Sofyan Djalil sudah mengusulkan kenaikan bertahap harga elpiji berukuran 12 kg sebesar Rp100-200 per kg setiap bulan. Ini bagian dari paket

liberalisasi migas yang akan dilakukan tahun 2010 (*Intelijen*, 26 Agt.-8Sept. 2009: 26-29), karena desakan investor-investor asing, seperti Shell, yang sudah memiliki belasan SPBU di Jabodetabek.

Berbicara soal SPBU dan kenaikan harga BBM, rezim SBY-Boediono tidak perlu terlalu khawatir pada kemungkinan oposisi di parlemen dari PDI-P. Bukan hanya karena Partai Demokrat dan partai-partai aliansinya menguasai mayoritas dalam parlemen, tapi juga karena dominasi keluarga Megawati Soekarnoputri-Taufik Kiemas dalam pucuk pimpinan PDI-P.

Dominasi keluarga besar ini dapat menyebabkan PDI-P tidak akan menentang kenaikan harga BBM. Maklumlah, sebagai pemilik lebih dari selusin SPBU, keluarga Mega-Taufik tidak akan dirugikan oleh kenaikan harga BBM. Kalaupun jumlah kendaraan yang mengisi bensin atau minyak solar di SPBU-SPBU mereka berkurang, akibat kenaikan harga BBM, diversifikasi usaha di seputar pompa-pompa bensin keluarga besar itu sudah mempertebal kocek mereka. Di SPBU milik keluarga besar Mega-Taufik di Jalan Penjernihan Raya di kawasan Pejompongan, Jakarta, dengan delapan pompa bensin dan solarnya, pengendara mobil dan motor bisa singgah minum kopi di gerai *Bengawan Solo* dan makan ayam cepat saji di gerai *Hartz Chicken* di kompleks SPBU itu.

Kedua jenis usaha makanan dan minuman itu milik mertua Puan Maharani, Bambang Sukmono Hadi (BSH), yang sehari-hari dikelola oleh Hapsoro alias Happy, suami Puan. Hanya beberapa puluh meter dari pompa bensin itu terdapat *Everfresh Fish Market*, toko ikan segar milik keluarga besar itu, yang diresmikan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri waktu itu, tanggal 4 Februari 2004. Gerai-gerai *Bengawan Solo* juga tersebar di DI Yogyakarta, yang dikelola oleh Sari, adik Hapsoro.

Sebelumnya, sejak 2005, BSH juga mengoperasikan properti mewahnya, Cangkringan Villas & Spa, dengan 14 kamar villa dan delapan kamar hotel di atas tanah seluas empat hektar dekat lapangan golf di lereng Gunung Merapi, di mana Puan Maharani beserta suami dan kedua orang mertuanya beristirahat, di tengah-tengah kesibukan kampanye Pileg yang lalu. Mertua Puan Maharani itu juga sedang membangun satu kompleks villa yang lebih kecil di Mendut, Jawa Tengah, dekat mahacandi Borobudur, dan sudah memiliki dan mengoperasikan Jimbaran Bali Villanya di Pulau Dewata, yang hanya sedikit lebih kecil ketimbang yang di Cangkringan, dengan 13 kamar.

### **Pentingnya Transportasi**

Setelah TK diorbitkan menjadi Ketua MPR-RI, seluruh kekayaan keluarga besar Mega-Taufik ini harus dilaporkan kepada publik. Termasuk laporan kekayaan BSH, untuk menghindari konflik kepentingan antara bisnis keluarga Ketua MPR RI dengan kelompok perusahaan milik keluarga besarnya. Misalnya, memanfaatkan villa-villa mewah besarnya untuk beristirahat dalam perjalanan-perjalanan dinas ke DIY, Jawa Tengah, dan Bali, dibiayai oleh uang rakyat.

Tentu saja, transparansi pemangku jabatan publik semacam ini tidak hanya diharapkan dari Ketua MPR-RI, tapi juga dari semua anggota parlemen maupun anggota kabinet baru nantinya. Seandainya Kuntoro Mangkusubroto diangkat menjadi Menko Perekonomian, publik perlu tahu, bahwa ia seorang komisaris PT Holcim Tbk, yang pabrik semennya punya penghasilan 480 juta dollar AS setahun (*Globe Asia*, Agt. 2009: 53). Sedangkan bisnis Rahmat Gobel sudah cukup diketahui oleh publik berkat promosi si cantik Dian Sastro Wardoyo. Betapapun, seperti halnya Ical dan JK di masa KIB jilid I, Kuntoro

Mangkusubroto dan Rahmat Gobel harus melepaskan jabatan swasta mereka, sebelum disumpah untuk memangku jabatan publik.

Transparansi kepemilikan perusahaan swasta oleh pejabat publik, serta pemisahan ‘kembar siam’ swasta dan pemerintah, merupakan konsekuensi logis dari janji politik duet SBY dan Boediono dalam deklarasi mereka di Gedung Sasana Budaya Ganesa ITB, Jumat, 15 Mei 2009. Waktu itu Boediono berjanji akan memberantas korupsi dalam tubuh pemerintah, dan juga mengancam bisnis keluarga para pejabat. Setelah SBY mengulangi hal itu dalam pidato politiknya, 4 Juni lalu, isu “dwifungsi pengusaha-pengusaha” mencuat kembali ke permukaan, mengulangi sinyalemen SBY empat tahun lalu.

Setelah SBY melontarkan sinyalemen tentang pengaruh “kapitalis rambut hitam” dalam sistem politik Indonesia, serangan balik pun dilancarkan oleh tim sukses dari kedua pasangan capres dan cawapres yang lain, dengan mengemukakan bisnis anak bungsu serta seorang ipar sang presiden, bekerjasama dengan keluarga ketua tim suksesnya, Hatta Rajasa (*Warta Ekonomi*, 15-28 Juni 2009: 49; *Prospektif*, 21-27 Nov. 2005: 9; *Indonesia Monitor*, 17 dan 14 April, 6-23 Juni 2009).

Memang, bahaya “dwifungsi pengusaha-pengusaha” ini patut dikemukakan, apabila rezim SBY-Boediono ingin mengubah citra yang sudah tertanam di ingatan public selama rezim SBY-JK sebelumnya. Waktu itu bisnis keluarga besar Jusuf Kalla memang berkembang pesat selama masa jabatan JK sebagai Wakil Presiden, melalui berbagai konglomerat yang dikelola oleh ipar, adik, anak, menantu, dan sahabat JK. Di maskapai penerbangan Lion Air, misalnya, Halim Kalla, adik JK, menjadi Komisaris (*Warta Ekonomi*, 15-28 Juni 2009: 49, 56; *Prospektif*, 10-16 April 2006: 12-21; *Tempo*, 23 April 2006: 94-101; *Tempo*, 30 Okt. 2005: 60-62, 74-75, 78-81; *Tempo*, 30 Jan. 2005: 110-111).

Selain bisnis keluarga JK, banyak bisnis keluarga menteri yang ikut berkembang pesat. Yang paling pesat perkembangannya adalah kelompok Bakrie milik keluarga Ical, menjadi kelompok bisnis kelima terbesar di Indonesia, dengan penghasilan 4,4 milyar dolar AS (2009), naik 1,3 milyar dolar AS dari penghasilan kelompok bisnis itu tahun lalu. Kenaikan penghasilan kelompok Bakrie yang sangat fantastis itu dibarengi dengan kenaikan kekayaan pribadi keluarga Ical dari 1,05 milyar dolar AS (2007) menjadi 1,85 milyar dolar AS (2009). Itu pun karena kekayaan keluarga Ical anjlok 6 milyar dolar AS, akibat nyaris bangkrutnya PT Bumi Resources milik mereka (*Globe Asia*, Agt. 2007: 40; *Globe Asia*, Juni 2008: 81; *Globe Asia*, Agt. 2009: 52).

Jauh lebih kecil ketimbang kelompok Bakrie adalah kelompok Kodel milik Fahmi Idris dan kawan-kawan. Selanjutnya, di awal masa jabatan kabinet sekarang, tercatat sejumlah perusahaan yang dipegang manajemen atau komisarisnya oleh sejumlah menteri, yang umumnya sejalan dengan bidang keahlian para menteri. Namun jabatan-jabatan di perusahaan-perusahaan swasta itu kemungkinan besar sudah dilepas oleh para menteri itu, dan diserahkan kepada kerabatnya. Misalnya, JK mengalihkan jabatannya di kelompok Bukaka kepada adik kandungnya, Achmad Kalla. Sedangkan Agung Laksono menyerahkan jabatannya di Adam Air kepada puteranya (*Prospektif*, 21-27 Nov. 2005: 13; *Tempo*, 4 Des. 2005: 123; *Warta Ekonomi*, 15-28 Juni 2009).

Sejauh yang dapat ditemukan datanya, Hatta Rajasa adalah satu-satunya menteri yang bisnis keluarganya tumpang tindih dengan bisnis keluarga besar SBY, yakni melalui PT Tower Telecom Tbk

(PowerTel). Adik bungsu Ny. Ani Yudhoyono, Hartanto Edhie Wibowo, Komisaris Utama Perusahaan itu. Sedangkan adik Hatta Rajasa, Achmad Hafisz Tohir, salah seorang direktur PowerTel. Pakar telematika Roy Suryo Notodiprojo komisaris independen PowerTel, dengan Dicky Tjokrosaputro, pewaris *Batik Keris*, sebagai direktur utama (*Tempo Interaktif*, 27 April 2009; *Warta Ekonomi*, 15-28 Juni 2009: 56; *Indonesia Monitor*, 7 dan 14 April 2009; [www.selular.co.id](http://www.selular.co.id), 2 Juli 2008; [www.jakartapress.com](http://www.jakartapress.com), 4 Ag. 2008).

PowerTel yang berkantor pusat di Jakarta, dengan enam kantor cabang di Pulau Jawa, mendapat berbagai proyek di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sewaktu Hatta Rajasa masih menjabat sebagai Menteri Perhubungan, yakni pembangunan *double track* jurusan Tanah Abang-Serpong bernilai Rp 333 milyar; pengadaan 16 unit kereta api listrik (KRL) bekas dari Jepang bernilai Rp 44,5 milyar; serta pengadaan jaringan serat optik di kawasan Jakarta, Bandung, dan Surabaya, dengan memanfaatkan jaringan rel PT KAI.

Pencatatan saham PowerTel dilakukan 18 September 2008, dengan PT BNI Securities sebagai penjamin. Timbul pertanyaan: apakah faktor perkerabatan ikut mempermulus hubungan antara PowerTel dengan BNI Securities? Sebab hari Rabu, 6 Februari 2008, seorang adik Ny. Ani Yudhoyono yang lain, Gatot Mudiantoro Suwondo terpilih menjadi Dirut BNI (*Tribun Batam*, 7 Febr. 2008; [www.liputan6.com/ekbis/?id=15450](http://www.liputan6.com/ekbis/?id=15450), 6 Febr. 2006).

Boleh jadi tidak ada hubungan bisnis khusus antara Gatot Mudiantoro Suwondo dengan Hartanto Edhie Wibowo. Sementara itu, adik bungsu Ny. Adi Yudhoyono itu juga dipercayai memangku berbagai jabatan penting dalam kendaraan-kendaraan politik SBY. Di DPP Partai Demokrat, Hartanto menjadi Ketua Departemen BUMN. Sedangkan di Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam, Hartanto dipercayai sebagai salah seorang bendahara. Sementara anak bungsu SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono, dipercayai menjadi salah seorang sekretaris yayasan itu (*Intelijen*, 6-19 Mei 2009).

Selain jabatan itu, Edhie Baskoro Yudhoyono yang akrab dipanggil “Ibas” juga dipercaya oleh ayah dan pamannya, Hadi Utomo, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, menjadi Ketua Departemen Kaderisasi DPP Partai Demokrat. Ibas juga ikut Center for Food, Energy, and Water Studies (CFEWS) yang digagas Heru Lelono, staf khusus Presiden SBY. Lembaga ini pernah bikin heboh dengan “Enerji Biru” dan padi *Super Toy-nya* (*Tempo Interaktif*, 3 Nov. 2008).

Sebelumnya Ibas, yang punya dua gelar *Bachelor of Commerce* dari Universitas Curtin di Perth, Australia Barat, serta gelar *Master in International Political Economy* dari Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technical University (NTU), Singapura, membuka pabrik biskuit di kawasan industry Jakabeka II di Cikarang, Jawa Barat. Tepatnya alamat PT Gala Pangan di Jalan Industri IV Blok PP-3. Walaupun tidak menerima kredit dari bank pemerintah, peletakan batu pertama pabrik itu dilakukan oleh sang ayah, sedangkan jalan ke lokasi pabrik yang rusak berat segera di-*hotmix*, dan pipa LPG ke pabrik itu segera disambungkan oleh pengelola Jababeka II (*Indonesia Monitor*, 16-23 Juni 2009).

Seluruh uraian itu patut jadi “lampu kuning” bagi SBY, agar dalam masa kepresidenannya yang kedua, sang jenderal lebih mengendalikan bisnis keluarganya. Selain itu, yayasan-yayasan yang ada

kaitan dengan SBY dan keluarga besarnya, yakni Yayasan Majelis Dzikir SBY Nusantara dan Yayasan Puri Cikeas, sebaiknya diaudit oleh auditor publik dan hasilnya dilaporkan ke parlemen dan ke media massa. Soalnya, kedua yayasan itu melibatkan sejumlah menteri dan staf harian Presiden, serta menguasai dana milyaran rupiah. Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurulssalam melibatkan tiga orang menteri (Hatta Rajasa, Sudi Silalahi, dan M. Maftuh Basyuni) sebagai Pembina, serta Brigjen Kurdi Mustofa, Sekretaris Pribadi Presiden SBY, sebagai Pengawas. Kegiatan yayasan ini telah menelan dana yang sebagian mungkin berasal dari anggaran negara. Misalnya, dana untuk kegiatan zikir dan doa di Masjid Baiturrahim di Kompleks Istana Negara di akhir 2006 dan 2008, yang diikuti antara 3000 dan 4000 jamaah, yang selesai berdoa, diundang makan malam di Istana Negara (*Kompas*, 31 Des. 2007; *Tempo*, 13 Jan. 2008: 34).

Biaya makan malam ribuan jamaah zikir itu mungkin dapat diambil dari anggaran rutin kepresidenan yang telah disetujui oleh DPR-RI. Tapi bagaimana dengan biaya ibadah umroh bagi lima rombongan ulama a 50 orang yang disponsori oleh yayasan ini, di mana setiap orang menelan biaya seribu real (*Antara News*, 16 Sept. 2008; *website* majelis dzikir; 'Husein Al Habsy Minta KPK Selidiki Majelis Dzikir SBY', *posted by* Masayok, August 25, 2008).

Boleh jadi, selain dari uang rakyat, melalui anggaran kepresidenan, pembiayaan yayasan ini dibantu oleh kedua orang bendaharanya. Selain Hartanto, ada bendahara lain, yakni Aziz Mochtar, mitra bisnis Bambang Trihatmodjo dan adik Muchsin Mochdar, ipar mantan Presiden B.J. Habibie. Selain itu, Aziz juga mitra Gunawan Yusuf, pemilik Sugar Group Company (SGC) yang sedang berkonflik dengan Anthony Salim tentang kepemilikan sejumlah perkebunan tebu di Lampung (*Tempo*, 13 Mei 2008; *Mahkamah*, 15 April 2009: 28-29; *Gatra*, 1 April 2009: 68-69).

Dibandingkan dengan yayasan di atas, Yayasan Kepedulian Sosial Puri Cikeas, disingkat Yayasan Puri Cikeas, yang didirikan oleh sejumlah penghuni kompleks perumahan mewah Cikeas Indah di Kabupaten Bogor, 11 Maret 2006, melibatkan lebih banyak pejabat, purnawirawan perwira tinggi, dan pengusaha. Ketua Dewan Pembinanya adalah Jero Wacik, Menteri Pariwisata dan Kebudayaan yang belakangan ini aktif mengecam pencaplokan Tari Pendet oleh iklan promosi pariwisata Malaysia.

Selain menteri tadi, sejumlah mantan perwira tinggi terlibat di Yayasan Puri Cikeas. Ketua dan anggota Dewan Penasehat yayasan ini adalah mantan KSAD Jendral (Purn.) Subagyo H.S., Komjen (Pol) Didi Widayaki, dan Mayjen TNI Bambang Sutejo. Sedangkan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Pengurus yayasan ini adalah Marsekal Madya (Purn.) Surrato Siswodiharjo, mantan Ketua INKOPAU, dan mantan Wakil Ketua MPR-RI Letjen (Purn.) Agus Widjojo. Mereka umumnya tetangga SBY di kompleks Cikeas Indah itu (*Detiknews*, 24 Sept. 2004).

Adapun para pebisnis yang namanya tercantum di struktur organisasi yayasan ini adalah Sofyan Basir, Dirut Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan mantan Dirut Bank Bukopin; Anton Sukartono, putra Suratto Siswodiharjo yang juga Wakil Bendahara DPP Partai Demokrat dan CEO PT Bakrie Building Industries; Glen Glenardi, Direktur Utama Bukopin; Sukamdani Sahid Gitosarjono, pemimpin dan pemilik Sahid Group, serta anaknya, Hariadi Budi Sukamdani; Tanri Abeng dan anaknya, Emil Abeng, Presiden Walinusa Energi, perusahaan yang bergerak di bidang penambangan batubara (*Tempo*, 13 Mei

2008; Laporan Tahunan 2002. Jakarta: Bank Bukopin; *website* Yayasan Puri Cikeas; *website* Partai Demokrat.

Jangan lupa, Ketua Umum yayasan ini, Suratto Siswodiharjo, juga seorang pebisnis, setelah berkarier di bidang kemiliteran dan politik. Lahir di Solo tahun 1946, lulusan AKABRI Udara di Yogyakarta (1969) dan Sarjana Sosial Universitas Jakarta (1992) menjabat sebagai Kasi Sospol Mabes AU (1990-1992), anggota DPRD DKI dari Fraksi ABRI dan Ketua INKOPAU (1998-2001). Tahun 1998, Suratto menjadi komisaris PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa (1998-2000) yang waktu itu masih milik Anthony Salim; anggota Dewan Audit Bank Bukopin (2001-2002); komisaris PT Prosys Engineering International (2005); dan komisaris PT Angkasa Pura II (2006-2007) yang mengelola bandara Soekarno-Hatta (Jakarta), Polonia (Medan), Sultan Syarif Kasim II (Palembang), Sultan Iskandar Muda (Banda Aceh), dan Supadio (Pontianak) (*Laporan Tahunan 2007/2007 Annual Report: Together We Build A Better Future*. Jakarta: PT Angkasa Pura II, hal. 3, 15; *Laporan Tahunan 2002*. Jakarta: Bank Bukopin; *Bank Bukopin Tbk Company Report: December 2006 As of 28 December 2006*. Jakarta: Bank Bukopin; *Mahkamah*, 15 April 2009: 28-29).

Dengan modal yang telah terkumpul dari berbagai usahanya, Suratto membeli tanah seluas 25 hektar di Desa Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, waktu masih berharga Rp 5000 per m<sup>2</sup> tahun 1995. Tanah itu kemudian dikapling-kapling, masing-masing seluas 1000 m<sup>2</sup>, dan tahun berikutnya ditawarkan kepada sejumlah perwira tinggi di jajaran Hankam, seharga Rp 35 ribu per m<sup>2</sup>. Sejumlah jendral membelinya, termasuk SBY, yang langsung membeli empat kapling. Suratto membangun rumahnya bersamaan dan bersebragan dengan SBY tahun 1997. Jadi boleh dikata, Suratto Siswodiharjo adalah seorang pengembang yang berhasil (*Detiknews*, 24 Sept. 2004; *Harian Komentor*, 27 Ag. 2007).

Boleh jadi, merekalah penyumbang kegiatan Yayasan Puri Cikeas, yang bergerak dalam penyelenggaraan Sekolah Alam Cikeas, penanggulangan bencana alam di DIY dan Jawa Tengah, warung murah, dan berbagai bentuk bantuan sosial, terutama buat penduduk pedesaan sekitar Cikeas. Sedangkan untuk bantuan pengobatan gratis, ada klinik keliling, gagasan Ny. Ani Yudhoyono (*Harian Komentor*, 27 Ag. 2007; *Radar Bogor*, 16 Ag. 2009).

Sejauh tidak menggunakan uang rakyat, dan murni dibiayai oleh pengusaha swasta, tidak ada masalah. Namun karena Sofyan Basir, Direktur Utama Bank Bukopin, Glen Glenardi, adalah ketua Badan Pengawas yayasan ini. Padahal Glen Glenardi pernah punya hubungan bisnis dengan ketua umum yayasan ini, ketika Suratto Siswodiharjo menjadi Komisaris (2001-2002), kemudian anggota Tim Audit Bank Bukopin (2006-2007).

### **Tidak Cukup Retorika**

Kesimpulannya, mantan jenderal dan guru besar yang sejak 20 Oktober lalu mulai mengendalikan kendali pemerintahan, perlu kerja keras untuk menciptakan pemerintahan yang bersih di negeri kita. Tidak cukup dengan retorika “Katakan Tidak Pada Korupsi”, seperti iklan dalam kampanye pemilu lalu. Juga tidak banyak gunanya hanya mencela fenomena “dwifungsi pengusaha-pengusaha”, lagu lama yang sudah pernah dikemukakan SBY 4-5 tahun lalu, tanpa menyusun peraturan pencegahannya.

Apalagi dengan melontarkan tudingan tentang adanya “kapitalis rambut hitam”. Sebab seperti yang pernah dikatakan oleh SBY, ketika menangkis sindiran wakil dan penantanginya: “Untuk setiap jari yang menuding orang lain, ada empat jari yang menunjuk ke diri sendiri”.

Guna mengakhiri tradisi politik buruk yang dirintis mendiang Jenderal Soeharto, SBY perlu bersikap lebih tegas terhadap keluarga besarnya sendiri, agar tidak ada anak, ipar, kerabat atau sahabatnya yang mengambil jalan pintas mengembangkan bisnis mereka dengan mendekati bankir-bankir pemerintah serta birokrat-birokrat papan atas, untuk mendapatkan order-order kelas kakap, dan juga tidak mau menerima kemudahan dalam penyediaan jasa jalan, listrik, dan bahan bakar bersubsidi, buat pengembangan pabrik yang baru berdiri kemarin sore.

Sikap tegas terhadap keluarga dan sahabat merupakan dasar moral untuk mengambil sikap tegas terhadap semua pejabat yang melakukan komersial-komersiasi jabatan, sebagaimana dicontohkan oleh Presiden Korea Selatan, Kim Dae Jung, yang memberikan grasi kepada kedua pendahulunya – Chun Doo Hwan dan Roh Tae-Woo – yang terancam hukuman mati dan hukuman 22,5 tahun karena korupsi dan pembantaian aktivis pro-demokrasi. Sebaliknya, sang presiden tidak segan-segan mengajukan anaknya ke meja hijau karena memberikan *kattebeletje* supaya Hanbo Steel mendapat kredit dari bank pemerintah negeri ginseng itu.

Juga, untuk mengakhiri tradisi yang dirintis oleh Soeharto, sebaiknya yayasan-yayasan yang menggunakan nama besar SBY maupun nama kediaman pribadinya, tidak lagi memanfaatkan figur-figur yang sedang berkiprah dalam pemerintahan. Rakyat yang cerdas juga tidak akan menuntut Kepala Negara memberi makan ribuan orang miskin di Istana Negara atau kediaman pribadinya, sebab Presiden bukanlah Raja yang kaya raya, dan memberi makan fakir-miskin bukan tugas sejumlah lembaga resmi, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, yayasan-yayasan yang ada kaitan dengan SBY serta kerabat dan sahabatnya, sebaiknya diaudit oleh auditor publik yang independen, bukan auditor langganan para bankir yang juga duduk dalam pengurus yayasan-yayasan itu, dan hasilnya dilaporkan ke parlemen, serta terbuka bagi media dan internet. Tujuan semua langkah supaya yayasan-yayasan sosial yang dekat dengan oknum-oknum penguasa jangan lagi menjadi pembuka jalan bagi korporasi-korporasi raksasa untuk mendapat perhatian khusus dari Istana, seperti tradisi Orde Baru yang sudah harus dikubur.

Dilandasi pembenahan ke dalam lingkaran pendukung SBY dan Boediono, pemerintah mendatang, didukung oleh parlemen dan lembaga peradilan, selayaknya menjalankan transparansi dalam hal melaporkan kekayaan dan jaringan bisnis mereka kepada rakyat Indonesia. Tujuan transparansi kekayaan para pemangku jabatan publik itu agar rakyat dapat mengontrol pejabat yang mereka pilih, atau yang mereka percayakan nasib bangsa ini.

Tegasnya, tujuan transparansi kekayaan pejabat itu supaya semua keputusan ekonomi dan politik yang diambil betul-betul demi kemaslahatan rakyat banyak, terutama mereka yang selama ini paling dipinggirkan. Bukan demi ekspansi perusahaan milik kerabat dan sahabat, dengan dalih menciptakan lapangan kerja.

Hanya dengan melakukan penertiban ke dalam, SBY akan punya '*moral high ground*' untuk menciptakan *clean government* selama masa jabatannya yang kedua ini.

## **Kepustakaan**

Aditjondro, George Junus (2001), *Cermin Retak Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Cermin.

----- (2003). *Dari Soeharto ke Habibie: Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari: Kedua Puncak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Rezim Orde Baru*. Jakarta: MIK (Masyarakat Indonesia untuk Kemanusiaan) & Pijar Indonesia.

Alkostar, Artidjo (2008). *Korupsi Politik di Negara Modern*. Yogyakarta: FH UII Press.

Angkasa Pura II (2007). *Laporan Tahunan 2007/2007 Annual Report: Together We Build A Better Future*. Jakarta: PT Angkasa Pura II.

Ardi, Yosef dan Rahmon Amri (penyunting) (2008). *JSX Watch 2008-2009*. Jakarta: Pustaka Bisnis Indonesia.

Bank Bukopin (2002). *Laporan Tahun 2002*. Jakarta: Bank Bukopin.

----- (2006). *Bank Bukopin Tbk Company Report: December 2006 As of 28 December 2006*. Jakarta: Bank Bukopin.

Ismawan, Indra (2007). *Harta dan Yayasan Soeharto: Kontroversi tentang Kekayaan dan Dugaan Korupsi Soeharto*. Jakarta: PT Buku Kita.

Masayok (2008), *Husein Al Habsy Minta KPK Selidiki Majelis Dzikir SBY*, posted on the internet on August 25.

Nikmah, Siti Khoirun dan Valentina Sri Wijiyati (2008). *My Dear Train, My Poor Train: Railway Efficiency Project (Proyek Efisiensi Perkeretapian)*. Working Paper No. 1. Jakarta: INFID (International NGO Forum on Indonesia Development).

Radjab, Suryadi A. (1999). *Praktik Culas Bisnis Gaya Orde Baru*. Jakarta: Grasindo.

Zen, Patra M. dan Agustinus Edy Kristianto (2007). *Meyusup Dalam Gelap: Wajah Hitam Kejayaan Salim Group*. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia.